



# RENCANA KERJA (RENJA) 2025



*Disusun oleh :*

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

 <https://dinkes.kaltaraprov.go.id>

 [dinkes@kaltaraprov.go.id](mailto:dinkes@kaltaraprov.go.id)

 (0552) 2024321 / 2024212

 Jl. Rajawali RT 46 Tanjung Selor

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunianya serta Ridhonya, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan selama tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah baik indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDG's). Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 harus dapat mengakomodasi capaian target yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya dan juga meningkatkan prestasi capaian kinerja yang sudah tercapai.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan "**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata**".

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Tanjung Selor, Mei 2024

Kepala Dinas



Usman, SKM.,M.Kes.

Pembina Utama Muda/IVd

NIP. 196808171993121004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.....	19
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.....	19
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan .....	19
2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan .....	19
2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.....	19
2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab tersebut.....	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>53</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	53
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	56
3.2.1 Tujuan .....	56

3.2.2 Sasaran .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>121</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
5.1 Catatan Penting .....	121
5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan .....	122
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	124

## DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 Dinas Kesehatan .....	10
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara .....	20
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan .....	36
2.4 Usulan Pokir DPRD Tahun 2025.....	51
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara .....	52
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional.....	54
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Mendukung SPM Kesehatan.....	56
3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 .....	58
4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Kalimantan Utara Tahun 2025.....	60

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Lokasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara TA. 2022 – 2024.....	9
3.1 Rencana Kerja Pemerintah .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) antara lain: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Penyusunan dokumen tersebut juga memperhatikan antara lain:

- Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Dokumen Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
  - Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.
- Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan

aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk implementasi tahun pertama periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi Visi Gubernur Kalimantan Utara serta Misi Ketiga yaitu **Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat**, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan kesehatan pada tahun sebelumnya yang berfokus pada Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan kesehatan, berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016 Nomor 5).
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2017 Nomor 1).
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5).
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 13).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025, sebagai berikut :

- Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2024. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan ke dalam program dan kegiatan, sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan tahun 2025.
- Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2025.
- Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

## BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

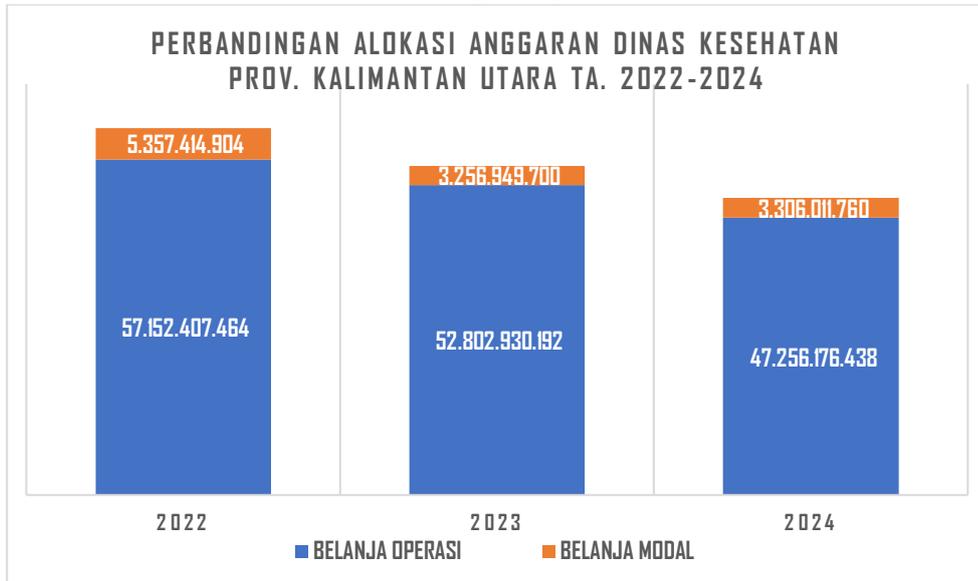
#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas kesehatan dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Pada dasarnya penyesuaian kegiatan dimaksud merupakan upaya untuk mengoptimalkan dalam pencapaian program kegiatan. Yang mana kegiatan prioritas di Perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara diharap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target nasional maupun program prioritas daerah.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam target/sasaran renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya menurut SPM, urusan wajib, dan/atau indikator kinerja Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Secara umum, Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 56.059.879.892,-. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 9,81% menjadi Rp. 50.562.188.198,- pada tahun 2024.

Gambar 2.1  
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  
TA. 2022-2024



Sumber : SIPD DINKES, 2024

Dari pagu yang dialokasikan pada tahun 2023, realisasi anggaran yang dilakukan sebesar Rp. 50.924.102.516,- ( 90,84%); dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp. 49.676.998.054,- (88,61 %) dan belanja modal sebesar Rp. 1.247.104.462,- (2,22 %). Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja/Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Wajib													
1	02	Bidang Kesehatan												
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60				
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60				
				Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60				
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	6 Dokumen	18 Dokumen	60	
1	02	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	15 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	9 Dokumen	60
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	60
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	6 Laporan	60
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	36 Bulan	60
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	36 Bulan	60
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah perjalanan dinas ASN dan Non ASN dalam dan luar daerah	3.625 Kali	775 Kali	775 Kali	775 Kali	100 Persen	675 Kali	2.175 Kali	60
						Jumlah Honorarium kegiatan yang dibayarkan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	36 Bulan	60
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	3 Laporan	60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target RenjaPD Tahun 2023	Realisasi RenjaPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jabatan	dan Pajaknya								
1	02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	160 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100 Persen	32 Unit	96 Unit 60
1	02 01 1.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	225 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	100 Persen	35 Unit	135 Unit 60
1	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen	0.341 Persen	0.341 Persen	0.341 Persen	100 Persen	0.141 Persen	100 Persen 60
			Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen 60
			Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen 60
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen 60
1	02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	2 Unit	6 Unit 60
			Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat esensial	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota 60
1	02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100 Persen	0 Unit	3 Unit 60
1	02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Dibangun	11 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	3 Unit	6 Unit 60
1	02 02 1.01 06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Berbasis	Jumlah lokasi pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis	52 Tempat	20 Tempat	20 Tempat	20 Tempat	100 Persen	12 Tempat	31 Tempat 60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja/Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Telemedicine, dll)									
1	02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Obat (RKO)	25 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	15 Dokumen	60
1	02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana IFK	59 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100 Persen	12 Unit	35 Unit	60
1	02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemusnahan obat, vaksin, perbekalan kesehatan dan pets kontrol yang dilakukan	10 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	00 Persen	2 Kali	6 Kali	60
1	02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan dan aset tetap di UPTD Instalasi Farmasi	555 Unit	111 Unit	111 Unit	111 Unit	100 Persen	111 Unit	333 Unit	60
1	02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan penyediaan jasa distribusi obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	36 Bulan	60
1	02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang diadakan	60 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100 Persen	12 Jenis	36 Jenis	60
1	02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	36 Bulan	60
1	02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan lokus bencana yang mendapatkan sosialisasi kejadian bencana	60 Desa/ kelurahan	14 Desa / kelurahan	14 Desa/ kelurahan	14 Desa/ kelurahan	100 Persen	10 Desa/ kelurahan	36 Desa/ kelurahan	60
			Jumlah Kab/Kota yang terlatih dalam Tim Gerak Cepat (TGC)	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
			Jumlah ketersediaan sarana prasarana kesehatan pada kondisi bencana atau berpotensi bencana	175 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	100 Persen	35 Jenis	105 Jenis	60
1	02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan pencegahan pengendalian penyakit yang berpotensi KLB	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
			Jumlah ketersediaan bahan habis pakai dan logistik penunjang kesehatan lainnya untuk penanganan pencegahan penyakit berpotensi KLB di Kab/Kota	60 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	100 Persen	10 Jenis	36 Jenis	60
1	02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kasus kematian ibu	100 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	100 Persen	25 Kasus	60 Kasus	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Angka kematian bayi	55 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	100 Persen	15 Kasus	33 Kasus	60				
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kab/Kota yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	4 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	3 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	350 Desa/ Kelurahan	70 Desa/ Kelurahan	70 Desa/ Kelurahan	70 Desa/ Kelurahan	100 Persen	60 Desa/ Kelurahan	210 Desa/ Kelurahan	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana promosi kesehatan	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasyankes yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 Persen	5 Unit	15 Unit	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan penyakit menular sesuai standar	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
						Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular > 80% populasi usia >15 tahun								
						Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
						Jumlah Kab/Kota >70% FKTP yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
						Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di >80% Puskesmas	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah calon jamaah haji yang mencapai istithaah	2.070 calon jamaah haji	414 calon jamaah haji	414 calon jamaah haji	414 calon jamaah haji	100 Persen	414 calon jamaah haji	1.242 Calon Jemaah Haji	60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024				
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan di wilayah DTPK yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan	1.250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100 Persen	250 Orang	750 Orang	60
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan di wilayah DTPK yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan	1.250 Orang	250 Orang	250 Orang	100 Persen	250 Orang	750 Orang	60
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia kesehatan	25 Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100 Persen	5 Kab/kota	15 Kab/kota	60
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah monitoring dan evaluasi program Dokter Program Internship dan Program Nusantara Sehat	25 Kali	5 Kali	5 Kali	100 Persen	4 Kali	15 Kali	60
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memperoleh pengakuan	15 Distributor	10 Distributor	10 Distributor	100 Persen	3 Distributor	9 Distributor	60
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	15 Distributor	10 Distributor	10 Distributor	100 Persen	3 Distributor	9 Distributor	60
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60
1	02	05	1.01		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	25 Perjanjian Kerjasama	5 Perjanjian Kerjasama	5 Perjanjian Kerjasama	100 Persen	5 Perjanjian Kerjasama	15 Perjanjian Kerjasama	60
						Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	15 Perjanjian Kerjasama	3 Perjanjian Kerjasama	3 Perjanjian Kerjasama	100 Persen	3 Perjanjian Kerjasama	9 Perjanjian Kerjasama	60
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	25 Perjanjian Kerjasama	5 Perjanjian Kerjasama	5 Perjanjian Kerjasama	100 Persen	5 Perjanjian Kerjasama	15 Perjanjian Kerjasama	60
						Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya	15 Perjanjian Kerjasama	3 Perjanjian Kerjasama	3 Perjanjian Kerjasama	100 Persen	3 Perjanjian Kerjasama	9 Perjanjian Kerjasama	60

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		untuk mendukung kesehatan									
1	02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60
1	02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60
		Jumlah Kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS dengan tiga kriteria	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60	
1	02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	5 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60
1	02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM	750 Desa	358 Desa	358 Desa	358 Desa	100 Persen	179 Desa	450 Desa	60
		Jumlah kab/kota yang memiliki Posyandu aktif minimal 80% dari jumlah Posyandu	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	2 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pembinaan 50% Posyandu aktif	25 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100 Persen	2 Kab/Kota	15 Kab/Kota	60

#### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dari seluruh program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023, tidak terdapat program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

#### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, seluruh program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023, telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

#### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, seluruh program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023, tidak ada yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

#### **2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Pada Tahun 2023, realisasi program/kegiatan Dinas Kesehatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang telah direncanakan. Pemenuhan target kinerja program dan kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Dalam menetapkan perencanaan program/kegiatan telah memiliki sasaran dan operasional yang jelas sehingga memudahkan dalam pencapaian target kinerja;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara berkala;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait (Kabupaten/Kota).

#### **2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Dengan tercapainya target kinerja hasil/keluaran seluruh program/kegiatan Tahun 2023, maka berimplikasi terhadap kesesuaian pencapaian (*on the track*) target kinerja program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Sehingga hal tersebut, dapat mendorong percepatan pencapaian Visi Misi Provinsi Kalimantan Utara.

### **2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut**

Secara umum, capaian target kinerja hasil/keluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun demikian perlu dilakukan upaya secara konsisten dan berkelanjutan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah memenuhi target dan juga diharapkan dapat melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua stakeholder terkait dalam Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua stakeholder terkait dalam setiap tahapan proses Pembangunan, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi;
2. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan APBN untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan APBD dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran dari kementerian/Lembaga secara kontinyu;
3. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian dan menyusun suatu logical framework terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara komprehensif dan holistik dengan melibatkan stakeholder terkait.
4. Memperkuat dan meningkatkan manajemen risiko terhadap pelaksanaan kegiatan dan program.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Adapun capaian Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
Angka Harapan Hidup	72.63	72.68	72.73	72.78	72.78	72.63	72.68	72.73	72.78	
<b>Indikator Tujuan :</b>										
Kasus Kematian Ibu	18	16	15	14	13	18	20	15	14	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	20.75	17.25	15.78	14.50	14.50	11.90	12.10	15.78	14.5	
Prevalensi Stunting	20	16	12	10	10	22.1	12.9	12	10	
<b>Indikator Sasaran:</b>										
Kasus Kematian Ibu	18	16	15	14	13	18	20	15	14	
Angka Kematian Bayi (AKB)	20.75	17.25	15.78	14.50	14.50	11.90	12.10	15.78	14.50	
Prevalensi Stunting	20	16	12	10	10	22.1	12.9	12	10	
Persentase Puskesmas yang terakreditasi	85	90	95	97	97	92	62.5	95	97	
Persentase RS yang terakreditasi	85	90	95	97	97	73	62.5	95	97	
Persentase Wilayah yang Terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	80	80	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada RSUD Jusuf SK	80	81	82	83	84	80.16	83.08	82	83	
Eliminasi Malaria Kab / Kota	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	
Insidensi HIV (Per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	≤ 0,23	≤ 0,22	≤ 0,20	≤ 0,18	≤ 0,17	0.24	0.25	≤ 0,20	≤ 0,18	
Insidensi TB per 100.000 penduduk	198	≤220	≤ 215	≤ 210	≤ 208	227	259	≤ 215	≤ 210	
Persentase Kab / Kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ≤ 80 per 100.000 penduduk	0	40	60	80	100	0	20	60	80	
<b>Indikator Kinerja Program :</b>										
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0.141	0.191	0.241	0.291	0.341	0.141	0.191	0.241	0.291	
Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	62.5	71.5	80	89.5	100	62.5	71.5	80	89.5	
Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase lembaga /kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>										
Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Mendapatkan Ijin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah SDM Kesehatan di wilayah DTPK yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan	1000	1100	1200	1300	1400	1000	1100	1200	1300	
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memperoleh pengakuan	6	7	8	9	10	5	6	8	9	
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	5	10	15	20	25	5	10	15	20	
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	3	6	9	12	15	3	6	9	12	
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat	3	4	5	5	5	3	4	5	5	
Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target. Antara lain:

a. Jumlah kasus kematian Ibu

Berdasarkan data kasus kematian ibu ditargetkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 16 kasus sedangkan capaian kasus kematian ibu pada tahun 2023 yaitu sebesar 20. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kematian ibu tahun 2023 tidak mencapai target hal ini dikarenakan beberapa kendala diantaranya adanya keterbatasan akses ke Faskes, Nakes terlatih, Sarpras yang standar. Oleh sebab itu untuk menurunkan kasus kematian ibu wilayah provinsi

Kalimantan Utara dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan melakukan Advokasi dan dukungan LP/LS, penguatan kapasitas petugas/nakes serta melakukan peningkatan kinerja melalui monitoring dan pembinaan.

b. Persentase Puskesmas yang terakreditasi

Pada akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 34 dari 58 puskesmas (62,5%) telah terakreditasi dari seluruh puskesmas di Kalimantan Utara. Puskesmas yang terakreditasi paripurna sebanyak 21, yang terakreditasi utama sebanyak 9, dan yang terakreditasi madya sebanyak 4 puskesmas. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2022, hanya terdapat 1 puskesmas yang terakreditasi paripurna sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21 puskesmas.

c. Persentase RS yang terakreditasi

Dari 16 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 11 Rumah Sakit yang telah terakreditasi (68,75%) dengan rincian 9 Rumah Sakit berstatus Akreditasi Paripurna (56.25 %), 1 Rumah Sakit berstatus Madya (6.25%) dan 1 Rumah Sakit berstatus Utama (6.25%). Adapun faktor Penghambat/Kendala diantaranya:

- 1) Standar Akreditasi Puskesmas yang baru terbit pada pertengahan tahun 2023 sehingga puskesmas butuh penyesuaian dokumen terhadap standar akreditasi yang baru.
- 2) Survei akreditasi puskesmas baru dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2023 puskesmas yang telah habis masa berlakunya harus menyampaikan komitmen mutu.
- 3) Untuk standar akreditasi Rumah Sakit Tipe D Pratama belum terbit sehingga rumah sakit D Pratama belum dilakukan survei.
- 4) Pendanaan survei akreditasi puskesmas baik APBN maupun APBD yang terbatas.
- 5) Terdapat 7 Puskesmas di Kabupaten Malinau yang tidak bisa survei di tahun 2023 yang batal survei karena terkendala transportasi, karena puskesmas masuk dalam wilayah sangat terpencil.

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara melakukan Upaya Perbaikan Program/Kegiatan di Tahun 2024, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan monitoring pengisian program perbaikan strategis bagi fasyankes yang telah melaksanakan akreditasi
- 2) Evaluasi pengisian INM dan IKP Fasyankes

- 3) Mendampingi fasyankes dalam hal pelaporan dan peningkatan mutu fasyankes
- 4) Tercapainya seluruh fasyankes yang terakreditasi dengan baik
- 5) Melakukan pertemuan dengan Dinkes Kab/Kota agar membina fasyankes diwilayah kerjanya masing-masing
- 6) Adanya Upaya mendorong Dinkes Kab/Kota untuk lebih terlibat dengan faskes rujukan
- 7) Melibatkan Fasyankes (rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium Kesehatan dan UTD, TPMD & TPMDG) untuk aktif berkoordinasi antar instansi dan dengan Dinas Kab/Kota setempat dalam hal peningkatan mutu pelayanan Kesehatan
- 8) Dinkes Prov/Kab/Kota dapat melakukan teguran secara tertulis terhadap fasyankes yang tidak melaporkan ASPAK sesuai dengan Permenkes No. 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang dimana sebagai salah satu persyaratan akreditasi fasyankes.

d. Eliminasi Malaria Kab / Kota

Dari 5 kab/kota di Kalimantan Utara, 3 Kab/Kota telah meraih sertifikasi Eliminasi Malaria dan stagnan selama 3 tahun. Terdapat 143 kasus malaria di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2023 dengan API 0,2 Per 1000 penduduk, dengan API tertinggi di Kabupaten Bulungan dan terendah di Kabupaten Tana Tidung.

Adapun Faktor Penghambat / Kendala pencapaian kinerja diantaranya:

- 1) Terkendala dengan demografis tempat penularan, rata-rata tempat penularan berada di daerah sulit terjangkau
- 2) Jumlah analis di faskes belum terpenuhi
- 3) Mobilitas tenaga dari perusahaan cukup tinggi
- 4) Notifikasi dan PE belum berjalan maksimal
- 5) Terdapat beberapa lokasi tambang ilegal yang masih sulit dijangkau dan diberikan tatalaksana malaria
- 6) Para perambah hutan yang nomaden hingga lintas Provinsi
- 7) Lokasi bebatasan dengan Provinsi dengan endemis sedang-tinggi

e. Insidensi HIV (Per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)

Target Insidensi HIV tahun 2023 yaitu sebesar <0,22 dengan capaian sebesar 0,30 dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat capaian program tahun 2023 yaitu 89,74%, hasil capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat diantaranya :

- 1) Masih rendahnya tingkat pemakaian kondom secara konsisten pada setiap kontak seks berisiko serta kesadaran untuk pemeriksaan dan pengobatan IMS sesuai standar menyebabkan tingginya angka penularan
- 2) Masih banyak kelompok masyarakat yang awam terhadap risiko penularan HIV, terutama masyarakat dengan keterbatasan sumber informasi dan juga pada populasi remaja
- 3) Domisili ODHA berbeda dengan lokasi layanan ARV
- 4) Keterbatasan sarana (laptop) dan kapasitas SDM petugas pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan IMS
- 5) Mutasi petugas tanpa transfer ilmu dan adanya petugas yang memegang 2-3 program

Upaya Perbaikan yang dilakukan di Tahun 2024, antara lain:

- 1) Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sector dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV
- 2) Peningkatan pengetahuan komprehensif melalui media cetak dan elektronik serta kampanye HIV pada anak sekolah dan remaja
- 3) Peningkatan akses layanan HIV dengan membuka layanan PDP di Puskesmas dan RS di wilayah Kabupaten/Kota
- 4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian program secara berkala
- 5) Peningkatan kapasitas petugas layanan PDP melalui pelatihan

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Utara melalui peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif melalui Program Indonesia Sehat dengan tiga pilar utamanya yaitu (1) Paradigma Sehat dengan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, (2) Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu dari fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dan (3) penerapan Jaminan Kesehatan Nasional. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama yaitu:

#### **1. Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur Panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya UHH di Kalimantan Utara mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan

Utara semakin membaik. Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 yaitu 72,67 sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 72.59, dari data tersebut dapat diketahui bahwa UHH Kalimantan Utara Mengalami penurunan sebesar 0.08. Sebagai bahan telaah, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, pemerintah menargetkan Usia Harapan Hidup sebesar 72,78 tahun. Oleh karena itu pemerintah daerah setempat harus lebih bekerja keras untuk mewujudkan angka tersebut. Banyak hal yang melatar belakangi Usia Harapan Hidup di suatu daerah pada posisi tinggi atau rendah. Keberhasilan program Kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan Angka Harapan Hidup itu antara lain, Pemerintah telah melakukan pemenuhan kepada Sarana dan Prasarana Kesehatan yang ada dengan menyediakan cukup obat dan peralatan kesehatan yang memenuhi persyaratan, meningkatkan pemenuhan standar mutu Rumah Sakit Umum Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan setiap standar mutu sarana pelayanan kesehatannya.

## **2. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi**

Pemerintah melakukan pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang ada dengan menyediakan cukup obat dan peralatan kesehatan yang memenuhi persyaratan, meningkatkan pemenuhan standar mutu Rumah Sakit Umum Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan setiap standar mutu sarana pelayanan kesehatannya.

Dari 16 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 11 Rumah Sakit yang telah terakreditasi dengan rincian 9 Rumah Sakit berstatus Akreditasi Paripurna (56.25 %), 1 Rumah Sakit berstatus Madya (6.25%) dan 1 Rumah Sakit berstatus Utama (6.25%).

Pada akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 54 dari 58 puskesmas (93%) telah terakreditasi dari seluruh puskesmas di Kalimantan Utara, dan baru 1 puskesmas yang terakreditasi paripurna. Proses survei akreditasi pada tahun 2023 mulai

dilaksanakan kembali paska pandemi Covid-19.

### **3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah indikator keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah angka kematian ibu mengindikasikan keberhasilan pembangunan kesehatan keluarga. Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 2023 sebesar 141.8/100.000 KH Menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 148/100.000 KH. Walaupun terjadi penurunan kasus tetapi tetap memberikan perhatian yang lebih untuk indikator ini dan saat ini masih menjadi prioritas utama masalah kesehatan di Kalimantan Utara. Simpul penyebab kematian ibu adalah status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan; kompetensi bidan desa masih kurang; jumlah dan penyebaran dokter tidak merata; dan belum optimalnya pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam dan anak) yang ada di rumah sakit dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri.

Penyebab kematian ibu sangat kompleks, dan Hipertensi dalam kehamilan menjadi peringkat tinggi penyebab kematian ibu. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu diantaranya: di tingkat Provinsi, 1) Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim audit external dari champion dan mentor untuk ditugaskan melakukan review/audit kematian ibu; 2) Mapping alur sistem rujukan yang melibatkan semua fasilitas kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) diikat perjanjian Kerjasama sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir yang diketahui Bupati/Walikota, 3) Membangun dialog bupati/Walikota, Kadinkes, Direktur RS dan para dokter spesialis kebidanan, anak, dan lain-lain untuk perbaikan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, 4) Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan kematian ibu dengan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, serta meningkatkan kemampuan strategi promosi Kesehatan penurunan AKI (dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan money) bagi petugas promkes dan kepala puskesmas di daerah AKI tinggi.

### **4. Angka Kematian Bayi Per 1000**

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup tahun 2023 sebesar 11.9/1.000 KH Menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 11.6/1.000

KH. Untuk menurunkan angka kematian bayi di wilayah provinsi Kalimantan Utara dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan melakukan 1) Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim audit external dari campion dan mentor untuk ditugaskan melakukan review/audit kematian ibu; 2) Mapping alur sistem rujukan yang melibatkan semua fasilitas kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) diikat perjanjian Kerjasama sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir yang diketahui Bupati/Walikota, 3) Membangun dialog Bupati/Walikota, Kadinkes, Direktur RS dan para dokter spesialis kebidanan, anak, dan lain-lain untuk perbaikan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, 4) Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan kematian ibu dengan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, serta meningkatkan kemampuan strategi promosi Kesehatan penurunan AKI (dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev) bagi petugas promkes dan kepala puskesmas di daerah AKI tinggi.

## **5. Persentase Stunting**

Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah asupan gizi yang diberikan pada anak tidak sesuai dengan kebutuhan serta berlangsung dalam waktu yang panjang. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Oleh sebab itu diperlukan upaya yang optimal dalam peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Renstra 2021-2026. Ini sejalan dengan The Copenhagen Consensus 2012 yang mendorong investasi untuk perbaikan gizi.

Angka stunting SSGI tahun 2023 turun dari 21.6% di 2022 menjadi 13.2% di tahun 2023. Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam tiga provinsi dengan penurunan stunting paling besar. Menurunnya stunting dikarenakan terlaksananya penguatan intervensi spesifik dalam penurunan stunting, upaya-upaya penurunan stunting yang berjalan didukung oleh beberapa lintas sektor terkait, adanya edukasi langsung dengan sasaran masyarakat tentang gizi seimbang berbahan pangan lokal yang didukung langsung oleh ketua Tim Pokja PKK Provinsi Kalimantan Utara dan lintas sektor terkait.

## **6. Eliminasi Malaria**

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara

alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina.

Kabupaten/Kota eliminasi malaria merupakan indikator keberhasilan pencegahan dan pengendalian Malaria, berdasarkan data Malaria Provinsi Kalimantan Utara stagnan dengan endemis rendah, dengan data capaian tahun 2023 sebagai berikut.

Data 5 kab/kota di Kalimantan Utara, 3 kab/kota sudah mencapai hasil Eliminasi Malaria, untuk Kabupaten Malinau akan dilaksanakan pre-assessment eliminasi pada tahun 2025, dan Kabupaten Bulungan pada tahun 2026 sehingga diharapkan seluruh kab/kota di Kalimantan Utara mencapai target Eliminasi Malaria pada tahun 2027.

Kementerian Kesehatan RI memiliki target Eliminasi Malaria sepenuhnya pada tahun 2030. Pencapaian Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan untuk mencapai target tersebut yaitu kasus terakhir penularan setempat pada tahun 2025, dan Indonesia mencapai Eliminasi Malaria Nasional pada tahun 2030.

Tantangan	Kendala
Dari 5 Kabupaten/Kota baru 3 yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria.	Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki Lab Pemeriksa Plasmodium Knowlesi.
Penularan Malaria terpetakan pada daerah illegal meaning (tambang illegal)	Upaya pengendalian kasus Impor malaria sulit dipantau
Ditemukan malaria knowlesi (penularan dari monyet)	Masih banyak masyarakat Kaltara berprofesi sebagai perambah hutan
Masih ditemukan kasus indigenous	Pengendalian Vektor Anopheles sebatas pembagian kelambu
Screening survey migrasi belum optimal	Keterbatasan SDM Kesehatan diwilayah DTPK

#### Rencana Tindak Lanjut

1. Pendampingan penilaian eliminasi malaria Kab.Malinau
2. Pembagian kelambu bagi masyarakat perambah hutan, pelaku tambang ilegal
3. Mewajibkan survei migrasi terutama masyarakat dari daerah endemis tinggi malaria. Seperti Penugas TNI/POLRI ke daerah Papua/Kaltim PPU
4. MBS dan pengobatan pada daerah penularan setempat/daerah pemetaan endemis tinggi malaria.

#### 7. Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Kalimantan Utara. Seiring dengan

meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk, jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah.

Incidence Rate (IR) penyakit DBD tahun 2023 di Kalimantan Utara menurun, yaitu IR 133.66 , sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 dengan IR 189.11. Turunnya kasus DBD di Kalimantan Utara disebabkan pola hidup sehat yang sudah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) juga terbukti efektif dalam pencegahan penyebaran nyamuk aedes aegypti dan kegiatan fogging. Jadi masyarakat yang meminta fogging di daerahnya, bisa langsung dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan setempat. Ini juga efektif karena mengurangi antrian panjang dan dapat segera dilakukan fogging guna meminimalisasi nyamuk terbang ke tempat lain.

Dalam pelaksanaan guna menurunkan angka kesakitan DBD di Kalimantan Utara ditemui kendala-kendala yang perlu untuk ditangani dan ditindaklanjuti seperti: 1) Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik tidak berjalan dengan baik; 2) Pemberantasan Sarang Nyamuk belum optimal; dan 3) Kerjasama lintas program belum terkoordinasi dengan baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan tahun mendatang dalam menurunkan angka kesakitan DBD adalah:

- 6) Mengupayakan pembudayaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara berkelanjutan sepanjang tahun dan mewujudkan terlaksananya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik;
- 7) Mengupayakan terbentuknya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanel) DBD di setiap tingkat administrasi dan melakukan revitalisasi Pokjanel DBD yang sudah ada dengan dukungan APBD
- 8) Upaya promosi kesehatan dilakukan di semua sektor, termasuk pembentukan Juru Pembasmi Jentik (Jumantik) pada anak sekolah dan pramuka;
- 9) Penemuan dini kasus DBD dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) yang merupakan bagian dan tata laksana kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (Puskesmas dan Rumah Sakit);
- 10) Pelatihan tata laksana kasus untuk dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 11) Penyediaan logistic tata laksana kasus DBD berupa rapid diagnostic test (RDT) dan reagen untuk diagnosis serotype virus DBD;
- 12) Pelaksanaan surveilans kasus DBD untuk memantau dinamika kejadian penyakit DBD di Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya KLB DBD dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini;

- 13) Pelaksanaan surveilans vektor *Aedes* spp. untuk memantau dinamika vektor, dengan demikian peningkatan populasi *Aedes* spp. Dapat diantisipasi dan dicegah.

#### **8. Persentase Penderita HIV yang Mendapatkan ARV**

Program HIV-AIDS merupakan salah satu prioritas kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dimana yang menjadi sasaran program yaitu menurunnya infeksi penyakit HIV dengan indikator program yaitu persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ARV), merujuk pada data tahun 2022 - 2023 terdapat peningkatan realisasi capaian dari 52.3% menjadi 78.96%, bila dilihat dari target yang ditentukan berdasarkan PMK No.13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 55% untuk periode tahun 2022 – 2023 realisasi capaian sudah melebihi target.

#### **9. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB**

Tuberculosis (TBC) atau TBC adalah adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *micro tuberculosis* yang dapat menular melalui percikan dahak. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak.

Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta organ meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyerang kematian. Dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling mematikan setelah Covid-19.

Persentase keberhasilan pengobatan TBC di Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 80.74% dari target 94% . Terjadi kenaikan yang signifikan atas pencapaian dibandingkan dengan tahun 2023 meskipun belum mencapai target sebesar 94%.

Upaya/kegiatan untuk pengendalian TBC dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara:

1. Pelatihan bagi kader TBC untuk melaksanakan investigasi kontak TBC dan sebagai PMO.
2. OJT pelaporan TBC melalui aplikasi SITB.
3. Pendampingan dengan Dinkes Kab/Kota, OP IDI agar melaksanakan jejaring TBC dengan DPM/Klinik Swasta untuk menemukan dan melaporkan kasus TBC.
4. Perencanaan Kebutuhan logistic (OAT dan non-OAT)
5. Monitoring dan Evaluasi Program TBC Kab/Kota

6. Kolaborasi dan koordinasi dengan Adinkes untuk merencanakan, melaksanakan program TBC.
7. Kolaborasi pemeriksaan TBC-HIV-DM-Stunting dengan Program PTM dan PP HIV-PIMS, Keswa.

#### **10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan**

Pengelolaan Jaminan Kesehatan bertujuan untuk mengurangi Beban Pengeluaran masyarakat provinsi Kalimantan utara, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kolaborasi lintas sector terkait data sasaran serta sinergitas antara pemerintah pusat, daerah TK I, II Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang mana pada tahun 2023 sebanyak 97,16% dari seluruh masyarakat Kalimantan Utara dengan total 38.583 Jiwa yang mendapat Pembiayaan Iuran JKN, bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin telah memiliki, terdaftar dan mendapatkan jaminan kesehatan dengan memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan program pemerintah pusat jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lintas sektor yang didalamnya terdiri dari berbagai akademisi untuk dapat menghasilkan kesepakatan pembiayaan bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Pada tahun 2018 didapatkan data-data terkait kependudukan serta data kepesertaan JKN/KIS, namun dari pembahasan demi pembahasan dapat diketahui bahwa pembiayaan harus dilakukan secara bertahap karena faktor alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pada tanggal 23 April 2018 telah terjadi kesepakatan antara penyelenggara jaminan kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dimana didalam kesepakatan tersebut memuat tentang 3 (tiga) hal penting, yaitu: 1) kepesertaan; 2) pembiayaan; dan 3) pelayanan. Yang dimaksud 1) kepesertaan adalah komitmen untuk dapat membantu BPJS Kesehatan guna mencapai kepesertaan 95%; 2) pembiayaan yang dimaksud adalah besaran kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meng-cover biaya atau iuran bagi penerima bantuan iuran; 3) pelayanan yang dimaksud adalah mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian program jaminan kesehatan di Kalimantan Utara untuk tahun 2023 yaitu sebanyak 38.583 jiwa penduduk di Kalimantan Utara. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan jaminan kesehatan diantaranya yaitu : (1) Kesulitan mendapatkan data masyarakat penerima manfaat jaminan kesehatan dikarenakan data yang tidak update atau kecocokan data hasil rekonsiliasi dengan data

disdukcapil (2) Mobilisasi penduduk kalimantan utara yang begitu masiv akan menimbulkan potensi ketidak tepatan sasaran pembiayaan (3) Proporsi pembiayaan daerah tingkat provinsi yang dinilai terlalu besar mengakibatkan dampak tingginya beban pembiayaan provinsi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan, dengan arahan kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan Dinas Kesehatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Adapun review terhadap rancangan awal Dinas Kesehatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				Rp 66.570.000.000,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				Rp 67.770.000.000,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				Rp 66.570.000.000,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				Rp 67.770.000.000,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 22.495.000.000,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 22.495.000.000,00	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Rp 1.000.000.000,00	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Rp 1.000.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	Rp 200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	Rp 200.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	Rp 800.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	Rp 800.000.000,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Rp 12.620.000.000,00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Rp 12.620.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/ Bulan	Rp 11.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/ Bulan	Rp 11.000.000.000,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Dokumen	Rp 1.400.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Dokumen	Rp 1.400.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Laporan	Rp 220.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Laporan	Rp 220.000.000,00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				Rp 200.000.000,00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				Rp 200.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	Rp 200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	Rp 200.000.000,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 1.975.000.000,00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 1.975.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	Rp 100.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	Rp 100.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	Rp 275.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	Rp 275.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp 1.500.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp 1.500.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp 100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp 100.000.000,00	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				Rp 2.250.000.000,00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				Rp 2.250.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	Rp 2.250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	Rp 2.250.000.000,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Rp 4.000.000.000,00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Rp 4.000.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 1.550.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 1.550.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 2.450.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp 2.450.000.000,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Rp 450.000.000,00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Rp 450.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	Rp 150.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	Rp 300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	Rp 300.000.000,00	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				Rp 41.445.000.000,00	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				Rp 41.445.000.000,00	
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 9.095.000.000,00	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 9.095.000.000,00	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Rp 5.000.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Rp 5.000.000.000,00	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Layanan	Rp 2.500.000.000,00	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Layanan	Rp 2.500.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	Rp 220.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	Rp 220.000.000,00	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp 550.000.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp 550.000.000,00	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 31.500.000.000,00	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 31.500.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	Rp 650.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	Rp 650.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	Rp 650.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	Rp 650.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 1.300.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 1.300.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 400.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 400.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp 1.350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp 1.350.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp 1.250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp 1.250.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 550.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 550.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 800.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 800.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							a			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	Rp 1.850.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	Rp 1.850.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414 Dokumen	Rp 300.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414 Dokumen	Rp 300.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	200 Orang	Rp 350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan	Semua Kota/Kab, Semua	200 Orang	Rp 350.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Kecanduan NAPZA		an, Semua Kel/Desa			Kecanduan NAPZA	Rehabilitasi Medis	Kecamatan, Semua Kel/Desa			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65000 Dokumen	Rp 20.000.000.000,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65000 Dokumen	Rp 20.000.000.000,00	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 500.000.000,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 500.000.000,00	
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 500.000.000,00	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 500.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp 400.000.000,00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp 400.000.000,00	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 850.000.000,00	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 850.000.000,00	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	Rp 850.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	Rp 850.000.000,00	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				Rp 1.100.000.000,00	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				Rp 2.300.000.000,00	
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 1.100.000.000,00	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 2.300.000.000,00	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	Rp 800.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	Rp 2.000.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	Rp 300.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	Rp 300.000.000,00	
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				Rp 290.000.000,00	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				Rp 290.000.000,00	
<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>				Rp 290.000.000,00	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>				Rp 290.000.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Sarana	Rp 290.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Sarana	Rp 290.000.000,00	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				Rp 1.200.000.000,00	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				Rp 1.200.000.000,00	
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 400.000.000,00	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>				Rp 400.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 400.000.000,00	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 400.000.000,00		
<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>					Rp 350.000.000,00	<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>					Rp 350.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 350.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 350.000.000,00		
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>					Rp 450.000.000,00	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>					Rp 450.000.000,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 450.000.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp 450.000.000,00		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<b>NON URUSAN</b>				Rp 40.000.000,00	<b>NON URUSAN</b>				Rp 40.000.000,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				Rp 40.000.000,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				Rp 40.000.000,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 40.000.000,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				Rp 40.000.000,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 40.000.000,00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Rp 40.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 40.000.000,00	

Dari tabel diatas maka terlihat bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 memiliki perbedaan dengan Analisis Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Perbedaan antara Kebutuhan dengan Rancangan Awal RKPD terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Rp. 800.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,-. Sub Kegiatan tersebut berisi kegiatan terkait Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan yang membutuhkan sertifikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dimana berdasarkan analisis permasalahan terhadap faktor penghambat capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, salah satu yang mempengaruhi adalah masih minimnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di Kalimantan Utara baik dari segi kompetensi maupun pemerataan sebaran terutama pada wilayah-wilayah perbatasan, sulit dan terpencil.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menindaklanjuti Rapat Penyeragaman Rancangan Renja dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yang melibatkan 5 (lima) Kabupaten/Kota se-Kaltara dan pokok-pokok pikiran DPRD maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah usulan yang diterima Dinas Kesehatan sebanyak 6 Usulan;
2. Jumlah usulan yang dapat dipertimbangkan untuk diakomodir oleh Dinas Kesehatan sebanyak 3 usulan yang terdiri dari total 6 (enam) usulan Pokir DPRD, usulan Musrenbang Inklusif dan usulan Kabupaten/Kota
3. Jumlah usulan yang ditolak dan dikembalikan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 3 usulan, dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Pokir DPRD Tahun 2025

NO	Usulan	Diterima/Ditolak	Keterangan
1	Pembangunan Guest House Keluarga Pasien dari Bulungan	Ditolak	Bukan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi
2	Pembangunan Gedung Neo Natal	Ditolak	Bukan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi namun diarahkan untuk menggunakan DAK
3	Permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai	Diterima	Akan terakomodir melalui program dokter terbang)
4	Sosialisasi berkesinambungan dari Dinkes tentang Reproduksi sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak	Diterima	Akan diakomodir melalui program pelayanan usia produktif
5	Pengadaan Ambulan Air untuk masyarakat Long Pelban	Ditolak	Tidak ada subkegiatan yang dapat mengakomodir
6	Bantuan dana hibah IBI untuk menunjang sarana dan prasarana Kesehatan	Diterima	Akan diakomodir melalui anggaran hibah

Apabila dipetakan berdasarkan program dan kegiatan, maka dari total 6 (enam) usulan yang berasal dari Pokir DPRD, usulan Musrenbang Inklusif dan usulan Kabupaten/Kota yang diakomodir Dinas Kesehatan dirincikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara

NO	Usulan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Kegiatan ini menjadi program inovasi sekaligus program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2014 hingga saat ini yang melakukan pelayanan spesialis di wilayah DTPK Provinsi Kalimantan Utara.
2	Sosialisasi berkelanjutan dari Dinkes tentang Reproduksi sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kegiatan ini berisikan pendampingan sosialisasi terkait kesehatan usia produktif.
3	Bantuan dana hibah IBI untuk menunjang sarana dan prasarana Kesehatan	-	-	Akan diakomodir melalui anggaran hibah

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

##### **3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 telah sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2025-2029. Berdasarkan arah kebijakan nasional dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 juga memperhatikan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

Selain RPJMN, urusan Kesehatan juga tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Adapun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemenkes menetapkan enam tujuan dan tujuh belas sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun sasaran strategis (SS) Kemenkes yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara sebagai acuan tahun 2020-2024 antara lain:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga dan Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik, Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain, dan Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif dan Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan



Prioritas nasional	Program yang mendukung prioritas nasional	Kegiatan yang mendukung prioritas nasional	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Provinsi Kalimantan Utara
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kalimantan Utara

Selain dukungan dalam pemenuhan Prioritas Nasional, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 juga diarahkan bagi pemenuhan Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang merupakan suatu mandatory spending Bidang Kesehatan sebagai konsekuensi logis dari Urusan Konkuren yakni Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Dinas Kesehatan sebagai pengampu urusan bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
yang mendukung SPM Kesehatan

SPM	Program yang mendukung prioritas nasional	Kegiatan yang mendukung prioritas nasional	Sub Kegiatan yang mendukung prioritas nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi Kalimantan Utara
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi Kalimantan Utara

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 3.2.1. Tujuan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan 14 (empat belas) Misi dimana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, berkeadilan dan merata, dengan sasaran :
  - a. Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas.
  - b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan.
  - c. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
  - d. Mendorong peningkatan sarana pelayanan kesehatan di perbatasan dan daerah sulit
2. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih, sehat dan dinamis, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS).
  - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi.
3. Mengembangkan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan serta menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan sasaran:
  - a. Terpenuhinya ketenagaan kesehatan yang profesional, bermutu dan merata, Bebas KKN.
  - b. Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin.
4. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sampai pada tingkat desa dan kelurahan, daerah terpencil perbatasan untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
  - a. Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD.

Dalam penetapan tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Adapun sasaran untuk tiap tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak;

- b. Meningkatnya perluasan akses dan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. Menurunnya angka kesakitan.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran di atas, maka indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak	Kasus Kematian Ibu	14	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	14.50	
		Prevalensi Stunting	10	
	Meningkatnya Perluasan Akses dan Mutu serta Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Persentase Puskesmas yang terakreditasi	97
			Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	97
			Persentase Wilayah yang terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada RSUD Jusuf SK	83
			Eliminasi Malaria Kab/Kota	4
			Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	≤ 0,18
			Insidensi TB per 100.000 penduduk	≤ 210
Persentase Kab/Kota dengan <i>Insiden Rate (IR)</i> DBD ≤ 80 per 100.000 penduduk	80			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 merupakan rencana program, kegiatan dan juga sub kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara bagi pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan; juga bagi pemenuhan dukungan terhadap program prioritas nasional serta menyelenggarakan SPM Bidang Kesehatan yang menjadi *mandatory spending* kesehatan di daerah.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan serta rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

1. Mewujudkan misi ke-3 (tiga) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
2. Pencapaian agenda prioritas daerah ke-10 (sepuluh) yaitu Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan.

Adapun rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran serta menindaklanjuti isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan terdiri dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS KESEHATAN</b>													<b>94.349.000.000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													<b>65.195.000.000,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													<b>65.155.000.000,00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-							-	<b>65.155.000.000,00</b>	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Dokumen 5 Dokumen			-	1.000.000.000,00			-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan p bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	3 Dokumen 5 Dokumen	<b>22.495.000.000,00</b>	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Laporan	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	----------------	---	------------------------------	---	--	---	-----------	----------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.620.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	-	13.475.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan			75 Orang/Bulan	11.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	75 Orang/Bulan	11.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	---	----------------	--	--	----------------	-------------------	---	------------------------------	---	--	---	----------------	-------------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	725 Dokumen			725 Dokumen	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	725 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				19 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	50 Orang			45 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	50 Orang	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.975.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	-	2.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
--	-------------------	---

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	40 Paket			35 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	40 Paket	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	10 Paket	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	12 Paket	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Paket	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	---	----------	--	--	----------	----------------	---	------------------------------	---	--	---	----------	----------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	7 Unit			-	2.250.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	7 Unit	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			6 Unit	2.250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	7 Unit	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	--------	--	--	--------	------------------	---	------------------------------	---	--	---	--------	------------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Bulan			-	4.000.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Bulan 12 Bulan	4.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Laporan	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	2.450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Laporan	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	32 Unit 40 Unit			-	450.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	32 Unit 40 Unit	560.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
--	-------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	32 Unit			32 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	32 Unit	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit			30 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	40 Unit	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	---------	--	--	---------	----------------	---	------------------------------	---	--	---	---------	----------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	undefined	undefined undefined			undefined undefined	40.070.000.000,00						undefined undefined	67.904.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	7.720.000.000,00			-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorier di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	-	34.799.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	2 Unit			2 Unit	3.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	2 Unit	5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														

			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	20 Layanan			18 Layanan	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	20 Layanan	27.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</i>	4 Unit			4 Unit	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	4 Unit	286.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Dokumen	605.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	5 Paket			5 Paket	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Paket	908.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	12 Layanan			-	31.500.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	12 Layanan	32.255.000.000,00	DINAS KESEHATAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar</i>	5 Orang			5 Orang	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Orang	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 Orang			5 Orang	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	3 Orang	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	1.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	1.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	4 Dokumen	1.485.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen			4 Dokumen	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan p bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	4 Dokumen	1.375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen			1 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	1 Dokumen	605.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16 Dokumen			16 Dokumen	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	16 Dokumen	1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>	414 Dokumen			414 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	414 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis</i>	200 Orang			200 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	200 Orang	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen			65000 Dokumen	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	65000 Dokumen	20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	5 Dokumen			5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	5 Paket			5 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Paket	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	850.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	-	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
--	-------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>	5 Unit			5 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Unit	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.100.000.000,00						-	1.150.000.000,00	

	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	5 Kab / Kota			-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Kab / Kota	1.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--------------	---	---	--------------	--	--	---	------------------	--	--	---	--	---	--------------	------------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	50 Orang			50 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	50 Orang	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen			20 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan p bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	20 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	------------	--	--	------------	----------------	---	------------------------------------	---	--	---	------------	----------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	290.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	290.000.000,00			-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan p bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	-	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan</i>	10 Sarana			3 Sarana	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	10 Sarana	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	1.200.000.000,00						-	1.250.000.000,00	

	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	25 Dunia Usaha			-	400.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	25 Dunia Usaha	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--------------	---	---	----------------	--	--	---	----------------	--	--	---	--	---	----------------	----------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	5 Kab / Kota			-	350.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Kab / Kota	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	5 Kab / Kota			-	450.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	5 Kab / Kota	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai ke mampuan keuangan daerah	-	5 Dokumen	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						40.000.000,00							40.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						40.000.000,00							40.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	-	-	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemberian tunjangan perbaikan p enghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kepend idikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan ke mampuan keuangan daerah	-	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
<b>J U M L A H</b>								<b>65.195.000.000,00</b>							<b>94.349.000.000,00</b>	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Catatan Penting**

Renja 2025 merupakan perencanaan program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di awal masa perodesasi penyusunan program dan kegiatan jangka menengah bagi pembangunan berikutnya. Meskipun begitu, berdasarkan peta permasalahan dan isu strategis yang mengemuka saat ini di Kalimantan Utara serta melihat isu dan arah kebijakan pembangunan nasional, maka pembangunan sektor kesehatan masih memiliki beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

- a. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19
- b. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat. Selain itu juga penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan masih perlu perhatian.

c. Penurunan AKI dan AKB

Jumlah kasus kematian ibu di Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kematian ibu yang cukup tinggi merupakan suatu gambaran rendahnya kualitas hidup perempuan khususnya ibu yang merupakan hak dasar yang perlu menjadi perhatian dan perlu upaya penuntasan yang lebih strategis. Selain itu kematian bayi juga masih menjadi persoalan di Kalimantan Utara. Meskipun nilai AKB Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka di bawah target nilai AKB yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, namun beberapa wilayah seperti Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya trend kenaikan jumlah kasus.

d. Prevalensi stunting yang masih tinggi

Prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Utara meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan hingga saat ini prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Utara masih di atas nilai target secara nasional. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan, baik dampak jangka pendek bahkan

dampak jangka panjang dari stunting, maka isu ini masih perlu menjadi perhatian bersama.

- e. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga dikarenakan tenaga kesehatan hanya terkonsentrasi di pusat kota. Selain itu juga kualifikasi dan kompetensi SDM Kesehatan yang adekuat yang merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelayanan kesehatan.
- f. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang terjaga standard mutu dengan mendorong peningkatan status akreditasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan.
- g. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya antrian dan panjangnya waktu tunggu pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- h. Belum dimanfaatkannya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan Kesehatan Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti telemedicine, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif digunakan di semua jenjang pelayanan kesehatan.

## **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 bertujuan untuk “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”. Selain itu juga untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (ketiga) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yakni mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan Data dan Bukti (Evidence Based Planning and Budgetting)

Rencana kerja harus didasarkan pada data kesehatan yang akurat dan bukti ilmiah. Ini termasuk data morbiditas, mortalitas, dan faktor risiko kesehatan lainnya yang relevan dengan tujuan program.

- b. **Penetapan Tujuan dan Sasaran yang Jelas**  
Tujuan dan sasaran program harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Ini membantu dalam memfokuskan upaya dan memudahkan evaluasi keberhasilan program.
- c. **Penganggaran yang Tepat**  
Anggaran harus disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan program. Ini termasuk alokasi dana untuk berbagai kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- d. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Sektor**  
Program dan Kegiatan kesehatan seringkali memerlukan kerja sama dengan sektor lain, seperti pendidikan, lingkungan, dan transportasi. Koordinasi antar sektor ini penting untuk mencapai hasil yang optimal.
- e. **Partisipasi Masyarakat**  
Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepemilikan (sense of belonging) dan keberlanjutan program.
- f. **Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM secara kontinyu**  
Program dan kegiatan harus mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan pihak lain yang terlibat secara kontinyu untuk memastikan SDM memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.
- g. **Pemantauan dan Evaluasi secara berkala**  
Pemantauan dan evaluasi harus menjadi bagian integral dari setiap proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan dan proses evaluasi dan pelaporan. Hal tersebut akan membantu dalam mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- h. **Pengelolaan/Manajemen Risiko**  
Identifikasi dan pengelolaan/manajemen risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan menjadi bagian penting untuk memitigasi dampak negatif yang tidak diinginkan.
- i. **Pelaporan yang Tepat Waktu dan Transparan**  
Pelaporan yang tepat waktu dan transparan tentang kemajuan dan penggunaan sumber daya penting untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.
- j. **Inovasi dan Adaptabilitas**  
Program kesehatan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan konteks serta terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas

program.

Kaidah-kaidah ini membantu memastikan bahwa program dan kegiatan kesehatan tidak hanya mencapai tujuan yang diinginkan tetapi juga dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Upaya pencapaian pembangunan daerah melalui pembangunan urusan kesehatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait baik dalam lingkup pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota serta melibatkan seluruh unsur pembangunan (penta helix) pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan serasi dan berkesinambungan;
- b. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan APBN dan APBD guna memastikan tercapainya pemenuhan layanan minimal bidang Kesehatan;
- c. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
- d. Pemerataan akses dan layanan yang menunjang peningkatan kualitas Kesehatan.

Adapun dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan seluruh *stakeholder* yang relevan.

Tanjung Selor, Juni 2024  
Kepala Dinas  
  
Usman, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda/IVd  
NIP. 196808171993121004